

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional diartikan sebagai transaksi bisnis antara satu negara dengan negara lainnya. Transaksi bisnis ini dapat berupa ekspor produk dari satu negara ke negara lainnya, pembelian bahan baku dari luar negeri, dan peminjaman dana dari bank suatu negara untuk membiayai bisnis negara lain. Perdagangan internasional menjadi hal penting karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, dan tidak ada satu negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan dengan negara lain. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka pembagian kerja menjadi semakin mudah sehingga perkembangan spesialisasi menjadi semakin pesat. Perdagangan internasional pada dasarnya timbul karena negara yang terlibat melihat adanya keuntungan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut dimana manfaat ini disebut manfaat dari perdagangan (*gains from trade*). Besarnya manfaat ini tergantung pada kekuatan negara dalam melakukan proses tawar-menawar (*bargaining position*).

Pengaruh perdagangan internasional yaitu pengaruh ekonomis dimana dengan adanya perdagangan internasional maka barang yang tidak diproduksi di dalam negeri dapat masuk dari luar negeri sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah yang lebih banyak dengan harga yang relatif lebih murah karena adanya persaingan. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh non ekonomis seperti pengaruh kultural, politik, militer, dan

sebagainya. Ekonomi internasional pada prinsipnya membahas hubungan ekonomi antar negara dan menjadi bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional seperti perdagangan dan moneter, organisasi swasta dan pemerintah serta adanya kerjasama internasional (Hady, 2001:14).

Dampak perdagangan internasional dari sisi ekonomi akan berdampak pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan akan ada manfaat maksimum yang dirasakan konsumen untuk kepuasan mengkonsumsi barang/jasa sesuai anggaran tiap individu, sedangkan sisi penawaran maka produsen sebagai penghasil barang akan mendapatkan keuntungan yang besar jika melakukan ekspor barang/jasa yang dihasilkan. Perdagangan internasional, devisa suatu negara akan semakin bertambah dengan syarat ekspornya lebih besar daripada impornya.

2.2 Kurva Impor dan Ekspor

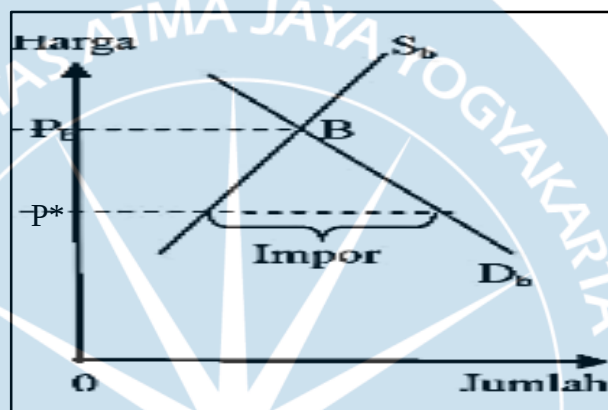
Kurva permintaan dan penawaran pasar dapat digunakan untuk menjelaskan bentuk perdagangan antar daerah maupun negara. Permintaan dalam ekspor suatu negara ditentukan oleh komposisi barang/ jasa, pendapatan masyarakat, dan distribusi pasar ke negara tujuan. Kurva yang dapat menjelaskan suatu negara melakukan kegiatan ekspor dan impor yaitu ada dua jenis kurva.

a. Kurva Permintaan Impor

Perdagangan dalam kegiatan impor gambar 2.1 menunjukkan B sebagai negara pengimpor. Pada negara B harga komoditas nya sebesar P_b . Pada negara B terjadi harga yang lebih besar dibandingkan pada pasar

internasional sehingga akan terjadi kelebihan permintaan di pasar internasional. Kelebihan permintaan akan menimbulkan keseimbangan harga sebesar P^* , yang mengakibatkan negara B mengimpor komoditas tertentu dengan harga sebesar P^* di pasar internasional.

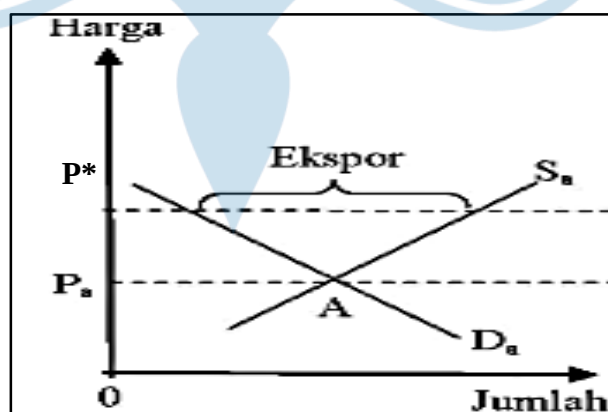
Gambar 2. 1
Kurva Permintaan Impor



Sumber: Salvatore, 2014

b. Kurva Penawaran Ekspor

Gambar 2. 2
Kurva Penawaran Ekspor



Sumber: Salvatore, 2014

Perdagangan dalam kegiatan ekspor gambar 2.2 menunjukkan A sebagai negara pengekspor, dimana pada negara A harga suatu komoditas sebesar P_a . Pada pasar internasional harga di negara A lebih kecil yaitu

berada pada harga P^* sehingga negara A mengalami kelebihan penawaran di pasar internasional. Kelebihan penawaran akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan harga sebesar P^* yang mengakibatkan negara A mengekspor di pasar internasional.

2.3 Kebijakan Perdagangan Internasional

Konsep perdagangan internasional bagi negara di dunia memiliki kebebasan dalam kebijakan ekonomi masing-masing negara, tetapi dalam perekonomian yang terintegrasi, kebijakan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi ekonomi negara lainnya. Salah satu tantangan koordinasi kebijakan internasional yaitu membuat perjanjian yang mengikat sehingga tidak ada negara yang memiliki insentif untuk melanggar perjanjiannya. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan terhadap neraca berjalan yang berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Kebijakan tersebut terdiri dari:

a. Kebijakan Tarif

Kebijakan tarif yaitu pungutan yang dikenakan pada barang ketika masuk ke batas suatu negara, yang biasanya dihubungkan dengan proteksionisme yaitu kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Besarnya tarif yang dikenakan pada produk impor biasanya bergantung pada negara asal produk tersebut. Adanya penetapan pajak barang impor menjadi hambatan jika barang impor dikenakan tarif maka harga barang tersebut akan meningkat. Bagi konsumen, kebijakan ini dapat mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal, sedangkan bagi eksportir yaitu tarif membuat produk menjadi kurang

kompetitif di pasar negara tujuan. Tarif dapat melindungi produsen dalam negeri dan dapat berkontribusi pada penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam dumping.

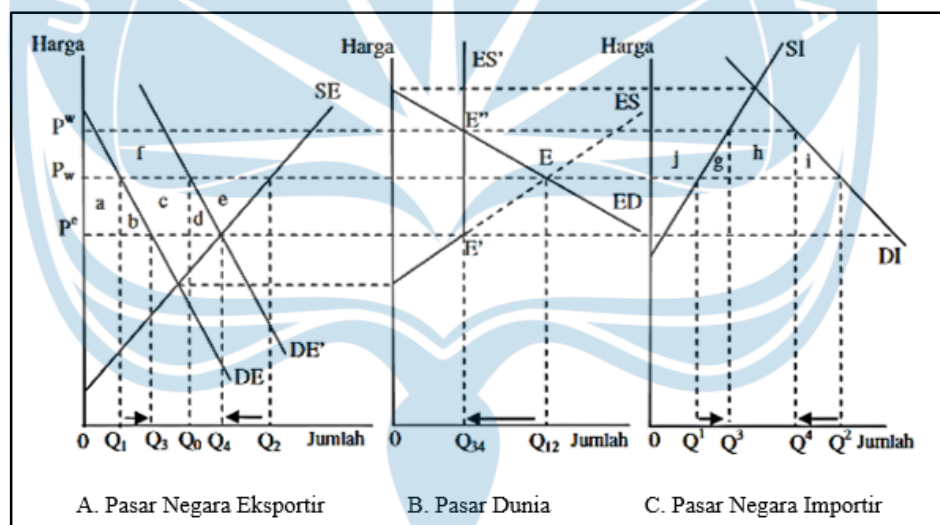
b. Kebijakan Non Tarif

Kebijakan non tarif yaitu kebijakan selain tarif yang ekonominya berdampak pada perdagangan barang internasional, mengubah kuantitas yang diperdagangkan, atau harga serta keduanya. Dalam kebijakan non tarif terdapat kuota impor, subsidi ekspor, dan kuota ekspor.

- 1) Kuota impor adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang impor. Jenis-jenisnya seperti absolut (yang ditetapkan sepihak oleh negara pengimpor), bilateral (ditetapkan secara bersama-sama antara pengimpor dan pengeksport), tarif kuota (gabungan antara tarif dan kuota), *mixing* kuota (membatasi penggunaan bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dalam produksi barang akhir).
- 2) Subsidi ekspor yaitu bantuan pemerintah untuk perusahaan dan produsen demi kepentingan ekspor dengan tujuan mempermudah harga ekspor untuk melawan persaingan.
- 3) Kuota ekspor adalah pembatasan langsung atas kuantitas atau jumlah barang ekspor. Tujuannya untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga untuk mencapai stabilisasi harga, biasanya dipakai pada bahan mentah yang menjadi barang perdagangan penting dan di bawah pengawasan badan internasional. Kuota ini menjadi hambatan perdagangan dengan menentukan jumlah maksimum barang

yang dapat diimpor pada periode tertentu yang mengakibatkan harga barang naik karena keterbatasan barang yang tersedia. Pemberlakuan kuota ekspor ini dapat melindungi barang dalam negeri dari persaingan barang luar. Pembatasan kuota ekspor kurang efektif dalam membatasi impor dibandingkan kuota impor karena negara pengekspor tidak mau menyetujui pengekanan eksportir asing yang cenderung mengisi kuotanya dengan mutu yang lebih tinggi dan produk yang harganya lebih mahal.

Gambar 2.3
Penerapan Kuota Ekspor di Negara Besar



Sumber: Tweeten, 1992

Berdasarkan gambar 2.3 dapat dilihat pada gambar A dimana kurva DE menjadi kurva permintaan domestik negara eksportir dan kurva DE' menjadi kurva permintaan total, dan SE merupakan kurva penawaran di negara eksportir. Sebelum negara eksportir melakukan kebijakan kuota ekspor maka harga yang berlaku di kedua negara sama yaitu sebesar P_w . Jumlah ekspor negara eksportir sebesar $(Q_2 - Q_1)$ yang besarnya sama

dengan jumlah impor negara importir ($Q^2 - Q^1$), sehingga terbentuk keseimbangan di pasar dengan volume perdagangan Q_{12} . Pemerintah negara eksportir memberlakukan kebijakan kuota ekspor, dimana volume ekspor dibatasi sebesar $(Q_4 - Q_3)$, maka pada tingkat harga P_w , penawaran barang yang bersangkutan di negara tersebut lebih besar dari permintaan domestik plus ekspor.

Keadaan ini menyebabkan harga di negara eksportir turun sampai muncul titik keseimbangan baru dimana permintaan domestik plus ekspor sama dengan penawaran (pada titik perpotongan DE' dengan SE , harga domestik turun dari P_w menjadi P^e). Pembatasan ekspor $(Q_4 - Q_3)$ menyebabkan kurva ES pada gambar B patah titik E' , karena mulai titik itu mekanisme pasar gagal. Pada titik tersebut volume ekspor tetap $(Q_4 - Q_3)$ pada gambar A yang besarnya sama dengan Q_{34} pada gambar B. Negara eksportir yang melakukan ekspor merupakan negara besar maka kebijakan kuota ekspor menyebabkan *excess demand* di negara importir yang tidak terpenuhi pada harga P_w sebesar $[(Q^2 - Q^4) + (Q^3 - Q^1)]$ pada gambar C, hal ini menyebabkan *excess demand* yang tidak terpenuhi yaitu sebesar $(Q_{12} - Q_{34})$ pada gambar B.

Excess demand yang tidak terpenuhi pada harga P_w menyebabkan harga dunia bergerak naik hingga keseimbangan baru terbentuk yaitu pada titik E'' , sehingga harga dunia naik dari P_w menjadi P^w . Kebijakan kuota ekspor di negara eksportir menyebabkan penurunan harga di negara tersebut dari P_w menjadi P^e , dan harga dunia meningkat maupun harga di

negara importir dari P_w menjadi P^w .

2.4 Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)

Kebijakan DMO adalah batas wajib yang mengharuskan produsen minyak sawit mengalokasikan produknya untuk kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan. Awalnya kebijakan ini hanya 20% kemudian naik menjadi 30% artinya produsen CPO wajib memasok 30% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mempertahankan kestabilan minyak goreng sawit dalam negeri, menjaga keseimbangan antara rumah tangga dan kepentingan ekspor yang telah lama menjadi sasaran tata kelola industri perkebunan kelapa sawit Indonesia. Kebijakan selanjutnya berfokus pada pembangunan dalam negeri untuk ekspor produk olahan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri.

Salah satu produk dari kelapa sawit adalah minyak goreng yang harganya sering kali tidak stabil. Awal mula terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng terjadi pada akhir tahun 2021 hingga 2022 awal, dari harga yang awalnya Rp 14.000 per liter sekarang menjadi Rp 20.000 per liter (Widjaya, 2022). Ini merupakan kenyataan yang mengejutkan karena Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak sawit mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) di dunia.

Pemerintah telah merespon berbagai kebijakan seperti subsidi minyak goreng, DMO (*domestic market obligation*) dan DPO (*domestic price obligation*) untuk mengendalikan kenaikan harga minyak goreng pada konsumen, di mana kebijakan ini mewajibkan eksportir CPO menjual 30%

produksinya untuk konsumsi dalam negeri dengan harga Rp 9.300/kg, dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter (Nafisah & Amanta, 2022). Kebijakan DMO dan DPO ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2022 namun kebijakan tersebut belum berhasil untuk mengatasi masalah kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasaran, yang diduga kurangnya pengawasan dan transparansi distribusi minyak goreng hingga sampai ke konsumen dan informasi yang kurang lengkap dan jelas.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif untuk mengatasi dinamika minyak goreng sawit, sehingga pemerintah memberlakukan kembali pengaturan tentang ekspor sementara kebijakan larangan CPO dan bahan baku minyak sawit dari tanggal 28 April hingga 22 Mei 2022. Setelah pencabutan kebijakan larangan ekspor, pemerintah memberlakukan kembali kebijakan DMO- DPO tanggal 23 Mei 2022. Kebijakan DMO dan DPO akan memperparah harga global karena suplai ke pasar global menjadi berkurang, dimana kebijakan ini dianggap sebagai pembatasan ekspor karena ditetapkan kuota pemenuhan konsumsi domestik minimal, dimana produsen harus menahan melakukan ekspor. Kebijakan ini juga akan berimbas pada penurunan pembelia perusahaan CPO kepada petani lokal. Perusahaan menggunakan kebijakan untuk menekan harga beli TBS dari petani. Adanya harapan kepada pemerintah untuk menelusuri oknum yang sengaja menekan harga TBS dari ketergantungan harga CPO internasional.

2.5 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan & Soesilo (2021) memiliki tujuan guna menganalisis dampak dari kebijakan hilirisasi dari pemerintah terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Teknik analisis yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* pada data panel dari industri hilir CPO dengan periode tahun 2000-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi CPO domestik tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hilirisasi dan kebijakan bea keluar, tetapi jumlah perusahaan dan harga CPO internasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan *gap* harga *output* produksi tahun sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap konsumsi CPO pada industri hilir. Industri minyak goreng kelapa sawit, industri ransum makanan hewan, industri oleokimia dasar dan biodiesel, industri minyak makan dan lemak nabati merupakan industri yang berpengaruh signifikan dalam menyerap CPO. Sedangkan yang tidak berpengaruh signifikan adalah industri minyak goreng kelapa dan industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah.

Penelitian yang dilakukan Mustafa (2022) mempunyai tujuan yang berfokus pada harga CPO di pasar global dan pengaruhnya terhadap penjualan minyak goreng di pasar domestik Indonesia yang menjadi produsen utama minyak kelapa sawit di dunia dan menyumbang 56% kebutuhan minyak sawit dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan di mana data sekunder didapatkan melalui artikel ilmiah maupun berbagai dokumen yang relevan. Data dalam penelitian ini yang sudah

didapatkan dianalisis dengan menghasilkan penjelasan secara deskriptif berupa kata-kata, gambar, maupun simbol yang akan dihubungkan dengan objek penelitian. Analisisnya dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan harga minyak goreng domestik berfluktuasi bukan hanya karena harga CPO di pasar global, tetapi karena adanya pengaruh dari dalam negeri yang menimbulkan fluktuasi harga minyak goreng seperti inflasi, DMO dan sebagainya. Harga CPO beberapa kali mengalami fluktuasi dan pada tahun 2021 adalah yang tertinggi, yang disebabkan karena faktor tingginya permintaan dan rendahnya stok CPO dan faktor produksi seperti iklim dan lain-lain. Kenaikan harga CPO berimbas pada produk turunannya yang mengalami kenaikan karena biaya hilirisasi yang mahal dan kompleks. Faktor internal seperti DMO untuk CPO menjadi salah satu penyebab fluktuasi harga yang membuat pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga minyak goreng saat mengalami kenaikan harga.

Penelitian Nafisah & Amanta (2022) yang membahas tentang produktivitas kelapa sawit tetap terbatas seiring melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia menjadi sorotan karena tingginya harga minyak goreng sejak kuartal keempat 2021 sampai dengan kuartal pertama 2022. Harga CPO internasional secara langsung mempengaruhi harga minyak goreng di Indonesia, tingginya harga CPO yang naik secara signifikan terjadi karena pasokan CPO turun sedangkan permintaan meningkat di seluruh dunia menyusul adanya pemulihan ekonomi pasca gelombang kedua pandemi Covid-19. Faktor yang

menyebabkan turunnya produktivitas sawit yaitu pertama karena kurangnya tenaga kerja di perkebunan yang pada saat pandemi dipulangkan ke kampung halaman masing-masing sehingga kapasitas produksi perkebunan sawit menjadi terbatas, faktor kedua karena cuaca buruk yang mengakibatkan banjir di perkebunan sawit dan menghambat produktivitas, faktor yang ketiga adalah tingginya harga pupuk yang menyulitkan petani untuk mengakses pupuk yang terjangkau.

Penelitian Bahtiar & Faraitody (2022) memiliki tujuan untuk menganalisis kenaikan harga minyak goreng, di mana yang diteliti adalah apakah perusahaan kelapa sawit memiliki kinerja perusahaan yang kurang baik sehingga melakukan perbuatan yang melanggar aturan demi perbaikan kinerja perusahaan dan apakah ada hubungannya dengan kenaikan harga minyak goreng. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data-data sekunder seperti laporan keuangan dari 21 perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa harga minyak goreng. Analisis data yang digunakan yaitu aplikasi *SmartPLS*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan mengalami naik turun dari tahun 2005-2021, di mana penurunan kinerja pada tahun 2019 paling signifikan karena adanya pandemi Covid-19, dilanjutkan tahun berikutnya naik dari 2020-2021. Kinerja perusahaan tahun 2021 sangat baik karena ekspor CPO mengalami peningkatan tetapi mengakibatkan cadangan CPO dalam negeri berkurang.

Purwadi, dkk (2018), Sinurat, dkk (2016), serta Novindra (2011) jauh

sebelumnya juga telah meneliti sejumlah aspek dari minyak sawit. Purwadi, dkk (2018) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak sawit dunia, mengetahui kebijakan yang timbul dengan adanya ekspor CPO sebagai pengaruh adanya fluktuasi harga minyak kelapa sawit, mengetahui hubungan harga minyak sawit dengan harga TBS, dan pola penjualan TBS dalam lingkup petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif studi korelasional, menggunakan pendekatan kuantitatif, dan analisisnya menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Hasil penelitiannya menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak sawit dunia adalah faktor produksi, faktor konsumsi, faktor kondisi nilai *endstock*, faktor harga minyak kedelai sebagai bahan substitusi, dan faktor harga minyak mentah terhadap minyak kelapa sawit. Dampak yang timbul karena adanya fluktuasi harga terhadap kebijakan ekspor yaitu peraturan menteri keuangan (PMK) yang dikeluarkan terkait bea keluar, mengadakan badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) di mana sumber dana berasal dari setiap ton ekspor terkait komoditi ekspor minyak sawit yang dilakukan di Indonesia.

Penelitian Sinurat, dkk (2016) memiliki tujuan untuk mempelajari dinamika Minyak Goreng Sawit (MGS) dan menganalisis dampak dinamika harga MGS terhadap perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari perkembangan luas areal dan produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia. Metode analisisnya menggunakan pendekatan model ekonometrika persamaansimultan dengan metode 2SLS dengan data sekunder dari instansi-instansi yang terkait periode 1990-2012. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa permintaan, penawaran, dan harga CPO sangat mempengaruhi dinamika harga minyak goreng sawit di Indonesia. Suplai secara signifikan dipengaruhi oleh produksi MGS, stok MGS, kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO), dan permintaan secara signifikan dipengaruhi oleh lag satu tahun *demand* MGS. Perubahan dari faktor kebijakan dalam sisi penawaran dan permintaan akan berdampak pada kinerja subsektor perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan respon luas areal dan respon produktivitas kelapa sawit.

Penelitian yang dilakukan jauh sebelumnya oleh Novindra (2011) mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan minyak sawit di pasar domestik dan dunia, menilai dampak kebijakan domestik dan perubahan faktor eksternal terhadap kesejahteraan pelaku industri minyak sawit Indonesia dan penerimaan devisa tahun 2003-2007, dan memperkirakan dampak kebijakan domestik terhadap kesejahteraan pelaku industri minyak sawit Indonesia serta penerimaan devisa tahun 2012-2016. Penelitian dengan model penawaran dan permintaan minyak sawit menggunakan sistem persamaan simultan di mana modelnya dirumuskan dari 39 variabel endogen dan 46 *predetermined variabel* yang terdiri dari 28 variabel eksogen dan 18 lag *endogenous variabel*, sehingga total variabel endogen dan eksogen adalah 85 variabel. Berdasarkan ketentuan *order condition* maka persamaan struktural yang ada dalam model yaitu *over identified*. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dengan rentang waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 2007, sumber datanya berasal dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen

Perdagangan, publikasi *Oils Annual World*, dan publikasi lainnya. Pengolahan datanya menggunakan program komputer yaitu *SAS/ETS for Windows 9.0*. Hasil penelitiannya menunjukkan harga minyak sawit domestik lebih responsif terhadap perubahan jumlah permintaan minyak sawit domestik daripada permintaan ekspor minyak sawit, sehingga pengembangan industri hilir minyak sawit domestik akan meningkatkan jumlah permintaan yang dapat meningkatkan harga yang diterima produsen minyak sawit domestik; kebijakan domestik berupa pembatasan ekspor minyak sawit dengan penetapan pajak ekspor sebesar 20 persen yang dapat meningkatkan kesejahteraan netto yang lebih besar daripada kebijakan kuota domestik dan kuota ekspor; dan peningkatan kuota domestik guna memberikan dampak negatif bagi kesejahteraan netto.